

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Kaderisasi Politisi Perempuan Dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Kupang” dapat disimpulkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Kupang sudah banyak melibatkan perempuan dalam setiap kepengurusannya, namun dalam melakukan sistem kaderisasi kepada anggota partai khususnya perempuan belum dilakukan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari Prinsip dan Proses Rekrutmen Kader Politisi Perempuan, Penugasan Kader Politisi PDIP, dan Jenjang Pengkaderan yang diikuti Politisi Perempuan PDIP. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

1. Prinsip dan proses rekrutmen kader politisi perempuan

Prinsip dan proses rekrutmen kader politisi perempuan terkait bagaimana proses penjangkaran, proses penyaringan serta proses penetapan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Kupang dalam memilih anggota baru sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam proses rekrutmen ini, semua orang bisa bergabung bersama partai, adapun syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu KTP dan Izasah pendidikan terakhir. Kemudian, keaktifan, loyalitas, pengalaman, pendidikan serta keterampilan juga harus dimiliki oleh anggota partai.

2. Penugasan kader politisi perempuan PDIP

Berdasarkan hasil analisis penulis, partai telah melibatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dalam organisasi sayap partai, struktur partai bahkan dinominsikan menjadi caleg sesuai dengan aturan yaitu keterwakilan perempuan 30% dengan baik. Namun walaupun demikian masih banyak kader politisi perempuan yang diberikan tanggung jawab tersebut tetapi belum mengikuti kaderisasi. Jadi, menurut penulis kaderisasi bukan menjadi tolak ukur seorang anggota partai untuk menduduki jabatan struktural dalam partai maupun dinominasikan menjadi caleg.

3. Jenjang pengkaderan yang diikuti politisi perempuan PDIP

Berdasarkan hasil analisis penulis, DPC PDI Perjuangan Kota Kupang baru 2 kali melaksanakan sekolah kader tingkat pertama yaitu pada tahun 2003 dan 2021. Dalam hal ini, ada banyak kader perempuan yang sudah mengikuti kaderisasi, namun ada banyak juga yang belum mengikuti kaderisasi. Banyak faktor yang membuat para politisi perempuan ini tidak mengikuti kaderisasi, salah satunya adalah karena urusan pekerjaan dan rumah tangga.

6.2 Saran

Direkomendasikan kepada DPC PDI Perjuangan, agar kaderisasi yang dilakukan bukan hanya bersifat terprogram dan berjenjang saja tetapi bisa menjadikan kaderisasi sebagai syarat wajib untuk semua kader partai terutama politisi perempuan. Bagi politisi perempuan di PDIP agar lebih proaktif, seperti berinisiatif mendaftarkan

diri untuk mengikuti kaderisasi agar lebih siap mengemban tugas partai tatkala ditugaskan mengemban tanggung jawab sebagai pengurus partai maupun dipercayakan menduduki jabatan politik. Sebab tahapan kaderisasi bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga pembelajaran memahami ideologi dan prinsip dalam internal partai maupun analisis terkait hal strategis pada eksternal partai.